

Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017

Nining Sudiyarti¹, Marisa Sutanty.², Ariyanto³

1. Keuangan Perbankan, Universitas Samawa
2. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa
3. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa

Email :

niningsudiyarti@universitassamawa.ac.id

marisasutanty@universitassamawa.ac.id

A121y4n70@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa tahun 2013 – 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pencatatan dokumen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Regresi Linear Sederhana, Uji Statistik t (Uji-t) dan Uji Koefisien Determinasi (R²). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kemandirian Fiskal (X) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y), yang diketahui berdasarkan hasil uji-t dimana t-hitung < t-tabel (1,713 < 2,132). Didukung pula berdasarkan koefisien determinasi R² bahwa diperoleh sebesar 0,494 atau sebesar 49,4 persen pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dan 50,6 persen disebabkan oleh variabel lain diluar jangkauan penelitian, seperti faktor tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan PDRB, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu daerah otonom di provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa saat ini sedang giat melakukan pembangunan diberbagai sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pokok-pokok pemerintahan di daerah, serta memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Wahiddin, 2017).

Menurut Triastuti (2008), tujuan pelaksanaan otonomi Daerah salah satunya memberikan peluang bagi kemandirian daerah untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pelimpahan kewenangan dalam bentuk Desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal atau kemandirain fiskal adalah penyerahan kewenangan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan terciptanya kemandirian fiskal pemerintah daerah akan mampu membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan tujuan daerah tanpa harus melibatkan pemerintah pusat dalam proses pembangunan daerahnya (Firman, 2012).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelolah dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya ialah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Hermani, 2010).

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari pembangunan manusianya karena manusia merupakan pelaku sekaligus tujuan utama pembanguna daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya ialah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Hermani, 2010).

Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Konsep pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat (Gozali *et al.*, 2010).

Indeks pembangunan manusia (IPM)/human developmen index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek hurup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (BPS, 2010). Menurut Septian Bagus Pambudi (2010), salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari pembangunan manusianya karena manusia merupakan pelaku sekaligus tujuan utama pembanguna daerah. Pemeritah Kabupaten/Kota yang mandiri akan mampu membiayai pembangunan daerah sehingga akan menciptakan pembangunan manusia.

Dengan demikian tingkat kemandirian fiskal mempunyai pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena kemandirian fiskal daerah dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihubungkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apa bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

KAJIAN PUSTAKA

Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemamfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat dengan terjadinya pelimpahan sebagai wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah. Diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investmen*) di daerahnya. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagai sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan (Firman, 2012).

Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah salah satunya memberikan peluang bagi kemandirian daerah untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pelimpahan kewenangan dalam bentuk desentralisasi fiskal. daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelolah dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan kemandirian fiskal adalah 1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan 2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim, 2008).

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah dapat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah, yaitu perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (TPD). Rumus sederhana untuk mengukur derajat kemandirian fiskal adalah sebagai berikut.

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt : Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt : Total Penerimaan Daerah tahun t

Adapun kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal atau kemandirian fiskal suatu daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Fiskal

Pesentase PAD terhadap TDP	Kemampuan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber : Bisma, 2010.

Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM)/*human developmen index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari kemampuan daya beli (BPS, 2010).

Hidayat (2008) memberikan penjelasan secara lebih terperinci mengenai dimensi pembangunan manusia tersebut, yaitu 1. Dimensi ekonomi yang diwujudkan oleh kehidupan yang layak dan diukur dengan indikator pendapatan per kapita riil; 2. Dimensi sosial, diwujudkan oleh tingkat pengetahuan dan diukur oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; dan 3. Dimensi kesehatan, perwujudannya adalah umur panjang dan sehat dengan indikator, yaitu angka harapan hidup saat lahir.

IPM mencoba untuk memberi peringkat dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 100 (tingkat pembangunan yang paling tinggi). Adapun kriteria IPM suatu daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.
Kriteria Penilaian Indeks Manusia (IPM)

Kriteria IPM	Kemampuan Daerah
50	Rendah
50 - 65	Menengah Rendah
66 - 80	Menengah Tinggi
> 80	Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004.

Tabel 3.
Nilai Komponen IPM

Indikator IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai Standar Global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Konsumsi per Kapita yang disesuaikan	732,720 ^(a)	300.000 ^(b)	UNDP Menggunakan PDB per Kapita Riil yang disesuaikan
a. Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan.			
b. Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah.			

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2010.

Indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut (BPS, 2010):

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya kualitas hidup manusia.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel

bebas, yaitu tingkat kemandirian fiskal terhadap variabel terikat, yaitu indeks pembangunan manusia Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau angka (Margono, 2010). Data kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari data tingkat kemandirian fiskal dan indeks pembangunan manusia Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017. Sedangkan Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam kata verbal bukan dalam bentuk angka (Margono, 2010). Data kualitatif dalam penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, meliputi: sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, visi dan misi.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan oleh sumber lain, seperti buku-buku literatur, catatan-catatan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diambil berupa data indeks pembangunan manusia (IPM) dan data PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017. Data tersebut diambil dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data indeks pembangunan manusia (IPM) dan data PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017 yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.

Identifikasi Variabel

Identifikasi variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*).

1. Variabel dependen (Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017 dalam bentuk persen. Indeks pembangunan manusia merupakan perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup.

2. Variabel independen (Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2016). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel tingkat kemandirian fiskal berupa perbandingan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel tingkat kemandirian fiskal terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Sumbawa Besar tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Uji T Statistik

Uji T statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Sebaliknya apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya secara individual.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam uji regresi linear berganda dianalisis pula besarnya koefisien regresi (R^2) keseluruhan. R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen/variabel terikat. R^2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. R^2 mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam menerangkan variabel terikat. Sebaliknya jika R^2 mendekati 0 maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat kemandirian fiskal (X) terhadap variabel indeks pembangunan manusia (Y). Untuk mengukur hubungan tersebut, maka dilakukan pengujian menggunakan uji t statistic. Berdasarkan *output* SPSS diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.**Hasil Pengujian T Statistik**

Variabel	t_{hitung}	Signifikansi	Keterangan
Kemandirian Fiskal (X)	1,713	0,185	Tidak Signifikan

Sumber: *output* SPSS, 2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel kemandirian fiskal (X) sebesar 1,713 sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat derajat kebebasan $df = n - k = 5 - 1 = 4$ pada α 5% (0,05) adalah 2,132, maka nilai t_{hitung} tersebut lebih kecil dari pada nilai

t_{tabel} ($1,713 < 2,132$). Dengan demikian variabel Kemandirian Fiskal (X) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) Kabupaten Sumbawa.

Sedangkan pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Berdasarkan *output* SPSS diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.703 ^a	0.494	0.326	1.15195
a. Predictors: (Constant), Kemandirian Fiskal				
b. Dependent Variable: IPM				

Sumber: *Output* SPSS, 2019.

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,494 atau sebesar 49,4 persen. Hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah sebesar 49,4 persen. Sedangkan sisanya sebesar 50,6 persen disebabkan oleh variabel lain di luar jangkauan penelitian seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel variabel kemandirian fiskal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sumbawa periode tahun 2013-2017. Hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan daerah. Pendapatan daerah terutama yang berasal dari sektor pajak tarifnya masih ditentukan dan dikelola oleh pemerintah pusat sehingga sumber pendapatan daerah berkurang. Alasan sentralisasi perpajakan sering dikemukakan sebagai upaya mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi dan keseragaman perpajakan; Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; Adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatism; Kelemahan dalam pemberian subsidi.

Menurut Susilo dan Adi (2007), tingkat kemandirian daerah setelah otonomi daerah tidak lebih baik daripada sebelum otonomi daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (2004), ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya PAD terhadap total belanja diantaranya masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah akan tetapi berada di luar wewenang pemerintah daerah; rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita; kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2004), ada lima penyebab tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yaitu kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan; Tingginya derajat sentralisasi dibidang perpajakan. Pajak yang produktif baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan atau perorangan (termasuk migas) seperti pajak pertambahan nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak, pertambangan, kehutanan) semua dikelola administrasi dan ditentukan tarifnya oleh pusat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Indeks pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kemandirian fiskal saja, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor selain kemandirian fiskal lebih mempengaruhi indeks pembangunan manusia, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat kemiskinan. Menurut Wicaksono (2014), Pertumbuhan ekonomi sekarang dipandang sebagai variabel yang memiliki peranan menggerak dan mendorong pembangunan manusia. Kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai seseorang. Dan kemiskinan yang akan membuat seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017. Hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan daerah terutama dari sector pajak, karena pendapatan yang berasal dari sektor pajak tarifnya masih ditentukan dan dikelola oleh pemerintah pusat (sentralisasi pajak) sehingga sumber pendapatan daerah berkurang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kemandirian fiskal saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain selain kemandirian fiskal. Faktor-faktor tersebut anatara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat kemiskinan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Diharapkan pemerintah agar lebih memperhatikan pelayanan pendidikan yang baik, pelatihan skill guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa. Dengan pendidikan dan skill yang baik, maka sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa akan dapat terserap lapangan kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah.
2. Pemerintah dan para pelaku usaha perlu lebih memperhatikan dan menggalakkan dukungan ekonominya terhadap sektor PDRB, demi mendukung pencapaian yang baik dalam meningkatkan tingkat Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Penerimaan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

DAFTAR PUSATAKA

- BPKAD. 2018. *Laporan Keuangan Daerah tahun 2013-2017*. Sumbawa Besar.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Sumbawa Dalam Angka*. Kab. Sumbawa
- Firman, 2012, *Desentralisasi fiskal (Kemandirain fiskal)*.
- Gozali, A. 2010. *Manajemen Otonomi Daerah: Birokrasi Ekonomi Sosial*. Jakarta: Pustaka LSKPI.
- Halim, A. 2008. *Bunga sampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hidayat, N. K. 2008. Analisis Hubungan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Skripsi*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Kurniawan, 2018. *Analisis regresi linier sederhana*.
- Margono,S. 2010. *Definisi penelitian dan Pengertian data kualitatif dan data kuantitatif*.
- Mudrajad Kuncoro, 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2013. *Definisi penelitian asosiatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahidin 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2016. *Skripsi*. Sumbawa Besar: Universitas Samawa.
- Wicaksono 2014, *Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan. Prosuks Domestik Regional Bruto (PDRB)*.

ISSN (P) : 2089-1210, E-ISSN : 2580-7285

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 7 No 1, April 2019

Triastuti. 2008. *Hakikat Kemandirian Fiskal*.